

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DENGAN  
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI EMPIRIS PADA  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN)**

Disusun Oleh

NAMA : EKA VOLIANA  
NPM : 1963001012  
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI: ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar  
Magister Terapan Administrasi Publik (M. Tr. A. P)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
PROGRAM MAGISTER TERAPAN  
TAHUN 2022**

## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Eka Voliana  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1963001012  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang telah saya susun ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penulisan tesis ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan atau ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, Desember 2022



Eka Voliana

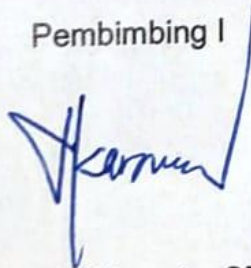
**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

**LEMBAR PERSETUJUAN TESIS**

Nama : Eka Voliana  
NPM : 1963001012  
Jurusan : Administrasi Publik  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara  
Judul Tesis (Bahasa Indonesia) : Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Kementerian Perdagangan)  
Judul Tesis (Bahasa Inggris) : *The impact of The Government's Internal Control System on The Quality of Ministries/Institutions Financial Statements with The Implementation of Government Accounting Standards As An Intervening Variable (Empirical Studies at The Ministry of Trade)*

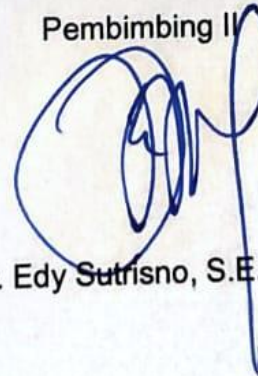
Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Dr. R. Luki Karunia, SE.Ak.MA)

Pembimbing II



(Dr. Edy Sutrisno, S.E., M. Si)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

**LEMBAR PENGESAHAN**

NAMA : EKA VOLIANA  
NPM : 1963001012  
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA  
JUDUL TESIS : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH TERHADAP  
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN/LEMBAGA DENGAN  
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI  
PEMERINTAHAN SEBAGAI VARIABEL  
INTERVENING (STUDI EMPIRIS PADA  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN)

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister  
Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN  
Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 22 Desember 2023  
Pukul : 12.00 – 13.00

**TELAH DINYATAKAN LULUS**

**PENGUJI TESIS :**

Ketua Sidang : Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A. ....  
Sekretaris : Arifiani Widjayanti, M.Si., Ph. D. ....  
Anggota : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd. ....  
Pembimbing I : Dr. R. Luki Karunia, MA. ....  
Pembimbing II : Dr. Edy Sutrisno, M.Si. ....

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Intervening ( Studi Empiris Pada Kementerian Perdagangan )”. Penelitian tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan guna meraih gelar Magister Terapan Administrasi Publik di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. R. Luki Karunia, MA dan Dr. Edy Sutrisno, M.Si selaku dosen pembimbing serta Dr. Bambang Giyanto, M.Pd selaku dosen pembahas yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini, oleh karena itu dengan segala kerendahan dan ketulusan hati yang paling dalam, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA, selaku Direktur POLITEKNIK STIA LAN Jakarta.
2. Tim Penguji Ujian Komprehensif Tesis, Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A. selaku Ketua dan Arifiani Widjayanti, M.Si., Ph. D. selaku Sekretaris.
3. Seluruh dosen, BAAK beserta segenap staff Program Studi Magister Manajemen Keuangan Negara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta bantuannya selama ini.
4. Bapak dan Ibu yang telah memberikan dukungan dengan penuh cinta, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan.
5. Ibu Fajarini Puntodewi selaku Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis Kementerian Perdagangan terima kasih atas waktu dan dukungannya serta motivasi yang diberikan.
6. Bapak Endang Mulyadi selaku Kepala Biro Keuangan Kementerian Perdagangan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.

7. Rekan-rekan di lingkungan Pusat Penanganan Isu Strategis Kementerian Perdagangan khususnya Azis, Ega, Pak Tomo, Amir, Dicky dan Roy yang telah bersedia meluangkan waktunya dan membantu serta memberikan motivasi dalam penulisan tesis ini.
8. Teman-teman sekelas Program Manajemen Keuangan Negara yang telah mendukung dan berjuang bersama dalam penyelesaian kuliah dan penyusunan tesis.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang.

Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya ilmu administrasi publik.

Jakarta, Desember 2022

Penulis,



Eka Voliana

## ABSTRAK

### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Kementerian Perdagangan)**

Eka Voliana

[eka.voliana@gmail.com](mailto:eka.voliana@gmail.com)

Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memediasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga pada Kementerian Perdagangan. Metode Penelitian yang digunakan yaitu analisis kuantitatif dengan *Structural Equation Model*. Penelitian dilakukan pada tahun 2022 dengan data sampel 102 responden dari Kementerian Perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memediasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga pada Kementerian Perdagangan. Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah tidak mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga secara langsung, akan tetapi dimediasi oleh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh karena itu, Kementerian Perdagangan diharapkan dapat meningkatkan penerapan SAP dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar kualitas laporan keuangannya lebih baik lagi.

Kata kunci :

Kualitas LKKL, Penerapan SAP, Sistem Pengendalian Intern

## **ABSTRACT**

### ***The impact of The Government's Internal Control System on The Quality of Ministries/Institutions Financial Statements with The Implementation of Government Accounting Standards As An Intervening Variable (Empirical Studies at The Ministry of Trade)***

Eka Voliana

[eka.voliana@gmail.com](mailto:eka.voliana@gmail.com)

Politeknik STIA LAN Jakarta

*This research aims to provide empirical evidences on whether the Implementation of Governmental Accounting Standards mediates the effect of the Government's Internal Control System toward the Quality of Financial Reports of Institutions/Ministries - in the case of Ministry of Trade. The method used by this research is quantitative analysis with Structural Equation Model. This research, which was conducted in 2022, uses sample data of 102 respondents from the Ministry of Trade. The result of this research shows that the Implementation of Governmental Accounting Standards does mediate the effect of the Government's Internal Control System toward the Quality of Financial Reports of Institutions / Ministries - in the case of the Ministry of Trade. The Government Internal Control System, as variable, does not directly affect the Quality of Financial Reports of the Institutions / Ministries - but the effect is mediated by the Implementation of Governmental Accounting Standards. Hence, the Ministry of Trade should improve the implementation of both Governmental Accounting Standards and the Government Internal Control System in order to enhance the quality of its Financial Reports.*

**Keywords :**

*The quality of financial reports, Internal Control System, Government Accounting Standards*

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Permasalahan .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Penelitian terdahulu .....	10
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis.....	16
C. Kerangka Berpikir.....	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	50
A. Metode Penelitian .....	50
B. Teknik Pengumpulan Data.....	50
C. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	52
D. Instrumen Penelitian .....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	64
A. Gambaran Objek Penelitian .....	64
B. Karakteristik Responden .....	70
C. Analisis Skala Likert.....	71
D. Analisis Deskriptif Variabel.....	72
E. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas .....	79
F. Analisis Structural Equation Model (SEM).....	82
G. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan.....	91
H. Rangkuman Hasil Penelitian.....	98
BAB V .....	100
A. Simpulan .....	100

B. Saran .....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN .....	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	162



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perkembangan Opini BPK terhadap LKKL.....	3
Tabel 1. 2 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2011 – 2021 .....	5
Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	10
Tabel 2. 2 Definisi Operasional Variabel.....	49
Tabel 3. 1 Metode Pembobotan Skala Likert.....	51
Tabel 3. 2 Simbol-simbol Path Diagram.....	54
Tabel 3. 3 Indeks Pengujian Kelayakan Model .....	56
Tabel 3. 4 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern (Pre-Test)..	58
Tabel 3. 5 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan .....	59
Tabel 3. 6 Hasil Uji Validitas Variabel Standar Akuntansi Pemerintahan .....	60
Tabel 3. 7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan .....	61
Tabel 3. 8 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Sistem Pengendalian Intern .....	62
Tabel 3. 9 Hasil Uji Reliabilitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (Pre- Test).....	63
Tabel 4. 1 Indikator Pencapaian Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa	67
Tabel 4. 2 Indikator Pencapaian Peningkatan konsumsi nasional .....	67
Tabel 4. 3 Indikator Tata Kelola Pemerintahan yang baik.....	68
Tabel 4. 4 Kelas Interval .....	72
Tabel 4. 5 Tanggapan Responden Terhadap Variabel LKKL.....	73
Tabel 4. 6 Tanggapan Responden Terhadap Variabel SPI .....	75
Tabel 4. 7 Tanggapan Responden Terhadap Variabel SPI .....	77
Tabel 4. 8 Hasil uji Convergent .....	80
Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabilitas .....	81
Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas .....	85
Tabel 4. 11 Uji Data Outlier.....	86
Tabel 4. 12 Output Analisis Uji Kelayakan Full Model .....	89
Tabel 4. 13 Hasil Pengujian Hipotesis .....	91
Tabel 4. 14 Nilai Estimate Hasil Pengujian Hipotesis .....	92
Tabel 4. 15 Hasil Regresi SPI terhadap LKKL.....	93
Tabel 4. 16 Nilai Estimate SPI terhadap LKKL .....	93
Tabel 4. 17 Nilai Estimate SPI, SAP dan LKKL .....	95
Tabel 4. 18 Standardized Indirect Effects .....	96
Tabel 4. 19 Rangkuman Hasil Penelitian.....	98

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir Penelitian .....	44
Gambar 2. 2 Model Regresi dengan Mediator .....	48
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan .....	69
Gambar 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	70
Gambar 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	71
Gambar 4. 4 Path Diagram.....	83
Gambar 4. 5 Hasil Uji Bollen Stine Bootstrap.....	87
Gambar 4. 6 Hasil Pengujian Full Model.....	88
Gambar 4. 7 Model Regresi dengan Mediator .....	97

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Penelitian.....	106
Lampiran 2 Hasil Kuesioner Pretest .....	113
Lampiran 3 Uji Validitas Pretest.....	116
Lampiran 4 Uji Reliabilitas pre test.....	126
Lampiran 5 Hasil Kuisisioner Penelitian.....	129
Lampiran 6 Hasil Ouput Amos.....	132
Lampiran 7 Surat Ijin Penlitian.....	160
Lampiran 8 Surat Keterangan Penelitian .....	161

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

# BAB I

## PERMASALAHAN PENELITIAN

### A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi adalah sebagai salah satu usaha pemerintah melakukan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Banyak reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah, salah satunya adalah reformasi keuangan negara. Solikin (2006) mengatakan praktik reformasi pada bidang keuangan di Indonesia dilaksanakan dengan adanya beberapa peraturan perundangan antara lain UU No. 17 tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, Undang-undang mengenai Perbendaharaan Negara yang diatur dalam UU nomor 1 Tahun 2004 serta undang-undang terkait Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara yang diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004. Ketiga UU tersebut dijadikan landasan oleh pemerintah untuk melakukan reformasi pada bidang keuangan, dimana dilakukan transformasi dari administrasi menjadi pengelolaan keuangan untuk menuju pemerintahan yang *good governance*.

Perwujudan akuntabilitas dan transparansi pada sistem keuangan pemerintah dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintah dalam bentuk laporan keuangan. Dampak dari pengelolaan keuangan yang buruk akan memunculkan penyimpangan dan kekeliruan dalam bidang keuangan seperti korupsi, kolusi yang bisa menimbulkan tuntutan-tuntutan hukum. Jika hal ini dibiarkan secara terus menerus akan membuat kesejahteraan masyarakat semakin berkurang. Selanjutnya, akan memunculkan krisis kepercayaan baik itu dari masyarakat, investor, dan kreditur akan ragu menempatkan dananya di Indonesia. Dengan demikian, pemerintah seharusnya dapat lebih meningkatkan akuntabilitas dalam

penyusunan laporan keuangannya sehingga akan terbentuk kepercayaan dari para pengguna informasi laporan keuangan.

Laporan keuangan selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan pada pemerintah pusat yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan K/L serta laporan keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Hasil pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK tersebut berupa opini atas laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Penjelasan Pasal 16 ayat (1), opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang berdasarkan pada kriteria (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (b) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian – WTP (unqualified opinion); opini wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian – WDP (qualified opinion); opini wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan dikecualikan, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan yang tidak dikecualikan dalam opini pemeriksa dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.
3. Opini Tidak Wajar – TW (adverse opinion); opini tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini atau Tidak Memberikan Pendapat – TMP (disclaimer of opinion); pernyataan menolak memberikan opini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan. Dengan kata lain, pemeriksa tidak dapat memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, sehingga informasi keuangan dalam laporan keuangan tidak dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan.

**Tabel 1. 1 Perkembangan Opini BPK terhadap LKKL  
Tahun 2017-2021**

Opini	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	80	82	85	85	83
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	6	4	2	2	4
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	2	1	1	-	-
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
Jumlah Enitias Laporan Keuangan yang Diperiksa	88	87	88	87	87

*Sumber : Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2017-2021 (diolah)*

Sejak tahun 2017 hingga 2021, perkembangan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) sudah cukup baik. Akan tetapi masih ada beberapa K/L yang belum mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan yang diperiksa. Pada tahun 2021 terdapat empat (4) K/L yang tidak mendapatkan opini WTP atas laporan keuangannya tapi mendapat opini WDP. Keempat kementerian dan lembaga tersebut, yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Kementerian Perdagangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun 2021 terdapat temuan auditor sebanyak 1.118 temuan yang terkait dengan sistem pengendalian internal dimana didalamnya terdapat pengendalian sistem akuntansi dan pelaporan.

Informasi keuangan yang wajar menurut (Kuntadi, 2019) didasarkan atas empat kriteria : (1) kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); (2) kecukupan pengungkapan; (3) kepatuhan laporan keuangan terhadap peraturan perundang-undangan; (4) efektivitas sistem pengendalian internal. (Yurniwatia dan Rizaldi, 2015) mengatakan bahwa penerapan sistem akuntansi dan pelaporan dalam laporan keuangan yang baik instansi pemerintah merupakan bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan.

Sebagai alat akuntabilitas publik, laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan salah satu jawaban dari besarnya ekspektasi publik atas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Melalui laporan keuangan ini, publik diberikan akses untuk mengetahui informasi keuangan. Meskipun demikian, pada dasarnya laporan keuangan bukanlah tujuan akhir dari akuntansi sektor publik. Mardiasmo (2018) mengatakan bahwa Laporan Keuangan mengandung sumber informasi keuangan yang sangat dibutuhkan dan mempengaruhi kualitas keputusan yang dihasilkan pihak manajemen.

Kerangka Konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan parameter-parameter normatif yang perlu diwujudkan dalam penyajian dan pelaporan informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik tersebut juga merupakan prasyarat normatif yang dibutuhkan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang diinginkan. Karakteristik kualitatif sebagaimana dijelaskan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan tersebut mencakup empat unsur yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Kualitas pelaporan keuangan adalah konsep kualitatif. Kualitas pelaporan keuangan mensyaratkan bahwa informasi keuangan harus relevan dan disajikan dengan dalam laporan keuangan untuk meningkatkan manfaat keputusan informasi keuangan bagi investor dan kreditur (IASB, 2008). Namun, peneliti tidak dapat secara langsung mengukur konsep kualitatif.

Ketidakmampuan untuk secara langsung mengukur kualitas pelaporan keuangan telah menghasilkan studi yang berfokus pada faktor-faktor yang dapat diukur secara empiris yang diyakini dapat mencerminkan kualitas pelaporan keuangan. (Hairstone dan Brooks, 2019).

## **B. Identifikasi Masalah**

Salah satu kementerian yang masih menjadi perhatian terkait penyusunan laporan keuangannya yang masih belum maksimal adalah Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Menyusun laporan keuangan. Kementerian Perdagangan merupakan salah satu Kementerian yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian pada Tahun 2021. Opini BPK untuk 11 (sebelas) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1. 2 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun 2011 – 2021**

<b>No.</b>	<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Hasil Opini dari BPK</b>
1.	2011	WTP
2.	2012	WTP
3.	2013	WTP
4.	2014	WTP
5.	2015	WTP
6.	2016	WTP
7.	2017	WTP
8.	2018	WTP
9.	2019	WTP
10.	2020	WTP
11.	2021	WDP

Berdasarkan Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kementerian Perdagangan pada tanggal 27 Juni tahun 2022. Atas hasil pemeriksaan tersebut Kementerian Perdagangan mendapat catatan hasil temuan yang terdiri atas sistem pengendalian intern dan temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan. Hasil temuan BPK antara lain :

1. Pencatatan Persediaan berupa pasar
  - a. Saldo persediaan per 31 Desember 2021 berupa barang diserahkan kepada Pemerintah Daerah/kelompok masyarakat dengan nilai Rp. 68.204.619.502 Miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.
  - b. Terdapat persediaan senilai Rp. 207,5 Miliar belum diserahkan kepada pemerintah daerah/kelompok masyarakat.
  - c. Kekurangan volume pada 41 pekerjaan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat melalui dana tugas pembantuan senilai 2,1 Miliar.
2. Pengelolaan Aset BMN
  - a. Terdapat asset peralatan dan mesin senilai 1,7 Miliar yang belum dilakukan pemutakhiran inventarisasi asset.
  - b. Pemanfaatan dan penggunaan gedung pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) tidak didukung dengan perjanjian kerjasama/kontrak.

Fenomena yang terjadi di Kementerian Perdagangan menggambarkan masih kurangnya peningkatan kualitas laporan keuangan yang ada dalam suatu instansi. LeinicNe (2000) menyatakan bahwa rendahnya kualitas pada laporan keuangan disebabkan atas pengendalian lingkungan internal yang belum dilaksanakan dengan baik. Curti s, Mary B. dan Wu, FredericN H (2000) mengatakan bahwa pengendalian internal merupakan alat yang dimanfaatkan untuk mencapai pelaporan keuangan yang akurat.

Beberapa penelitian telah mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan diantaranya adalah Sistem

Pengendalian Internal dan Penerapan Standar Akuntansi. Standar Akuntansi juga penting untuk akuntansi sektor publik. Kualitas informasi akuntansi dan keuangan yang baik dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemerintah serta akuntabilitas kepada masyarakat dan pembayar pajak. Standar Akuntansi Sektor Publik Internasional dapat menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang dapat dibandingkan di seluruh negara. (Oulasvirta, 2014)

PP nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa SPIP mencakup identifikasi, penerapan dan evaluasi atas tujuan dan fungsi dari pemerintah pada setiap tingkat kegiatan dan pengendaliannya yang dilihat dari standar akuntansinya. Sistem Pengendalian Intern dapat mempengaruhi efektifitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

Reformasi Akuntansi Sektor Publik bertujuan untuk mentransfer prinsip akuntansi teknik manajemen sektor swasta ke unit manajemen sektor publik. (Moase dan Ilie, 2012) berdasarkan penelitian yang dilakukan di Rumania mengungkapkan bahwa berdasarkan perubahan di lembaga publik di seluruh sektor publik, Rumania diwajibkan menerapkan sistem akuntan publik baru agar mampu bersaing pada perubahan yang terjadi.

Di Indonesia sendiri pada tahun 2010 telah diterbitkan peraturan terkait sistem akuntansi yang berbasis akrual yaitu dituangkan dalam PP nomor 71 tahun 2010, tetapi penerapan untuk sistem akuntansi tersebut baru dimulai pada tahun 2015. Sebelum diterapkan sistem akuntansi tersebut, digunakan sistem akuntansi berbasis *cash toward accrual*.

(Sanders.et.al, 2017) berpendapat bahwa pentingnya pengendalian internal, kerangka kerja pengendalian internal COSO, dan efek yang dapat ditimbulkannya pada beberapa area dalam perusahaan, terutama proses pelaporan keuangan perusahaan, adalah minat berkelanjutan bagi akademisi, firma, auditor, dan regulator.

Berdasarkan atas pemaparan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dengan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris pada Kementerian Perdagangan)”***. Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui fakta empiris bagaimana Penerapan SAP memediasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah informasi secara literatur maupun praktik mengenai Kualitas Laporan Keuangan K/L pada Kementerian Perdagangan.

### **C. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan penjelasan permasalahan yang telah dipaparkan dalam latar belakang, pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini antara lain :

1. Apakah SPIP berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) pada Kementerian Perdagangan?
2. Apakah Sistem Pengendalian Intern mempengaruhi Penerapan SAP pada Kementerian Perdagangan?
3. Apakah Penerapan SAP berpengaruh terhadap Kualitas LKKL pada Kementerian Perdagangan?
4. Apakah Penerapan SAP memediasi pengaruh SPIP terhadap Kualitas LKKL pada Kementerian Perdagangan ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian untuk menjawab pertanyaan permasalahan dalam penelitian antara lain :

1. Melakukan Analisa secara empiris mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL).
2. Melakukan Analisa secara empiris mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Penerapan SAP.
3. Menganalisis secara empiris pengaruh Penerapan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL).
4. Menganalisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) yang dimediasi Penerapan SAP.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian yang dilakukan adalah:

1. Manfaat teoritis :

Dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen keuangan negara khususnya teori akuntansi sektor public yaitu peran laporan keuangan yang dipengaruhi oleh SPIP yang dimediasi oleh penerapan standar akuntansi pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh para pengambil kebijakan di lingkungan Kementerian Perdagangan khususnya di bidang pelaporan keuangan dan akuntansi untuk memberikan perhatian terhadap faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan Kementerian/Lembaga.

- b. Dapat digunakan sebagai pertimbangan para pengambil kebijakan dibidang akuntansi Langkah-langkah apa yang akan diambil untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dan bagaimana mempertahankan kualitas laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang sudah baik dengan melihat indicator yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.